



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NONO HARTANTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **202306**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.651.178.750**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
2. Tanah Seluas 2.300 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 892 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah Seluas 6.600 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp. 55.000.000
7. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
8. Tanah Seluas 1.920 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
9. Tanah Seluas 440 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/126 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA



DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.131.178.750

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 2.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 11.703.078

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.664.881.828

III. HUTANG

Rp. 450.240.275

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.214.641.553

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.